

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Rancangan ini disusun dalam rangka memberikan apresiasi terhadap implementasi perluasan percontohan Desa Antikorupsi sebagai komitmen untuk pencegahan korupsi di wilayah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, sehingga perlu disesuaikan.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

## **DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN .....	5
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	6
BAB III MATERI MUATAN .....	7
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	7
B. RUANG LINGKUP MATERI .....	7
BAB IV PENUTUP .....	7
A. SIMPULAN .....	7
B. SARAN .....	7
DAFTAR PUSTAKA .....	8

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan juga memiliki pemerintahan sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa merupakan setiap kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang baik di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mampu dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ini merupakan apresiasi terhadap implementasi perluasan percontohan Desa Antikorupsi sebagai komitmen untuk pencegahan korupsi di wilayah Kabupaten Semarang.

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa tersebut untuk mendukung keberlanjutan program Desa Antikorupsi di wilayah Kabupaten Semarang.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah bagaimana melaksanakan Ketentuan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang baik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

## **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Terbitnya Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

## **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor ....) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor ....)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Dalam dalam rangka pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ini merupakan apresiasi terhadap implementasi perluasan percontohan Desa Antikorupsi sebagai komitmen untuk pencegahan korupsi di wilayah Kabupaten Semarang.

## **BAB III MATERI MUATAN**

### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Terbitnya Terbitnya Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Adapun Ruang lingkup Perubahan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. SASARAN DAN KRITERIA
2. PENGGUNAAN
3. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### **B. SARAN**

Agar Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ini menjadi apresiasi dan Motivasi terhadap implementasi perluasan percontohan Desa Antikorupsi sebagai komitmen untuk pencegahan korupsi di wilayah Kabupaten Semarang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor ....) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor ....)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100)